

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN LITERASI
INFORMASI MASYARAKAT KAWASAN PEDESAAN
(Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul)**



Oleh:
Wahyudi Sekedang
NIM: 19200010011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

Gelar *Master of Arts* (M.A.)

**Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi**

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wahyudi Sekedang, S.IP.**
NIM : 19200010011
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Wahyudi Sekedang, S.IP

NIM: 19200010011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wahyudi Sekedang, S.IP.**
NIM : 19200010011
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022
Saya yang menyatakan



Wahyudi Sekedang, S.IP
NIM: 19200010011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-63/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN LITERASI
INFORMASI MASYARAKAT KAWASAN PEDESAAN (Studi pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYUDI SEKEDANG, S.IP
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010011
Telah diujikan pada : Senin, 24 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 61f549c1e2a2f



Penguji II

Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f3a055ba67



Penguji III

Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f1587649e7



Yogyakarta, 24 Januari 2022
UTN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f3a0a34d8a

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul :

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
LITERASI INFORMASI MASYARAKAT KAWASAN PEDESAAN
(Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul)**

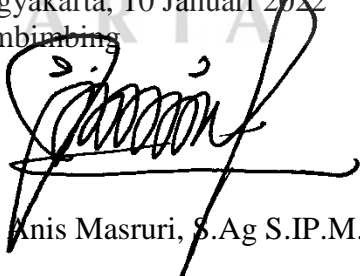
Yang ditulis oleh :

Nama : **Wahyudi Sekedang, S.IP.**
NIM : 19200010011
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2022
Pembimbing


Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP.M.Si.

ABSTRAK

Wahyudi Sekedang, S.IP. (19200010011): *Collaborative Governance* Dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi Masyarakat Kawasan Pedesaan (Studi Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul) Tesis, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi terlaksananya proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, bagaimana model *collaborative governance* yang dijalankan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses *collaborative governance* tersebut, serta untuk mengetahui dampak *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Adapun uji keabsahan data menggunakan *credibility* dengan cara *triangulasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi DPK Kabupaten Gunungkidul melaksanakan *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, serta regulasi kebijakan. (2) Strategi peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yang dijalankan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul yaitu memperbanyak koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat sudut baca, mengadakan layanan perpustakaan keliling, menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat, mengadakan perlombaan yang berkaitan dengan perpustakaan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, melakukan pembentukan, pembinaan, dan pendampingan perpustakaan desa. (3) Model *collaborative governance* yang dijalankan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan di Kabupaten Gunungkidul terbagi ke dalam empat tahap yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. (4) Faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yaitu komitmen dari *stakeholders*, *information sharing*, dan bantuan dana pihak swasta. Sedangkan faktor yang menghambat proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yaitu kurangnya dukungan pemerintah desa, dan kurangnya komitmen pengelola Perpustakaan Desa.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Literasi Informasi, Pengentasan Kemiskinan



ABSTRACT

Wahyudi Sekedang, S.IP. (19200010011): Collaborative Governance in Improving Information Literacy Competence of Rural Communities (Study at the Library and Archives Service of Gunungkidul Regency) Thesis, Interdisciplinary Islamic Studies Program, Concentration of Library and Information Science, Postgraduate, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

This thesis attempts to identify the reasons behind the implementation of collaborative governance in improving literacy competence of rural communities in Gunungkidul, the collaborative governance model administered by the Library and Archives Service (DPK) of Gunungkidul Regency, the factors supporting and hindering the collaborative governance process, and to investigate the impact of collaborative governance in improving literacy competence of rural communities on poverty alleviation in Gunungkidul. This study takes the form of descriptive qualitative method with purposive sampling technique. Then, the data collection techniques used are observation, structured interviews, and documentation. The data analysis employs several steps of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The data validity test examines the credibility by means of triangulation.

The results showed that: (1) There are three factors behind the implementation of collaborative governance by DPK of Gunungkidul Regency in improving literacy competence of rural communities in Gunungkidul, namely the lack of human resources, the lack of budget, and policy regulations. (2) The strategies to improve information literacy competence of rural communities in Gunungkidul carried out by DPK of Gunungkidul Regency were by multiplying collections conforming to the community needs, building reading corners, providing mobile library services, making the library a center for community activities, arranging competitions related to libraries, establishing cooperation with various parties, and conducting the establishment, development, and assistance of village libraries. (3) The collaborative governance model implemented by DPK of Gunungkidul Regency in improving information literacy competence of rural communities in Gunungkidul is divided into four stages, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. (4) The factors supporting the collaborative governance process in improving information literacy competence of rural communities in Gunungkidul are commitment from the stakeholders, information sharing, and private funding assistance. Meanwhile, the factors hindering the collaborative governance process in improving information literacy competence of rural communities in Gunungkidul are the lack of support from the village government and the lack of commitment from the village library management.

Keywords: Collaborative Governance, Information Literacy, Poverty Alleviation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Puji syukur kehadiran Allah Swt yang atas izin-Nya, tesis dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi Masyarakat Kawasan Pedesaan (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul)” bisa penulis selesaikan.

Penulis sadar bahwa tesis ini tidak bisa selesai tanpa adanya bantuna, motivasi, serta doa dari banyak pihak, baik dukungan yang sifatnya materiil ataupun moril. Maka dari hal tersebut, penulis ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariana Noor, M.A., selaku Koordinator Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi saran, arahan, serta bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan untuk beliau.
5. Drs. Ali Ridlo, M.M., selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul yang sudah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap dosen program Pascasarjana serta karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

7. Para informan, baik itu secara tatap muka ataupun virtual yang sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dan pandangan pada saya, sehingga penyusunan tesis ini bisa terselesaikan.
8. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan IPI A 2019/2020, terima kasih untuk kebersamaan yang sudah terlewati.

Penulis berharap semoga tesis ini bisa memberi manfaat serta bisa berkontribusi dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, baik yang bersifat praktis ataupun teoritis. Penulis juga sadar bahwasanya hasil penelitian ini belum sempurna, sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2022
Penulis,

Wahyudi Sekedang, S.IP.
NIM:19200010011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SAYA DEDIKASIKAN TESIS INI KEPADA:

1. Ayahnda, Basarudin, S.Pd. & Ibunda, Kasumah, S.Pd. serta kakak saya Reni Kumalasari, S.TH., M.A. beserta keluarga kesilnya dan adik saya Ahmad Baqi.
2. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu.
3. Segenap dosen, guru, dan seluruh pihak yang saya ambil manfaat dari mereka semenjak kecil sampai menjadi diri saya sekarang ini (*alfatihah*)
4. Almamater tercinta, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Buku adalah sahabat terdekat,
Membaca adalah aktivitas terhebat, dan
Menulis adalah ekspresi dan warisan terdahsyat”.**

-Muhsin Kalida-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kajian Teori	17
1. Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	17
a. Prinsip <i>Collaborative</i>	22
b. Alasan Terlaksananya <i>Collaborative Gouvernance</i>	24
c. Model <i>Collaborative Governance</i>	27
2. Literasi Informasi	33
a. Jenis Literasi Informasi	35
b. Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat.....	38
F. Metode Penelitian.....	43

1. Metode dan Pendekatan Penelitian	43
2. Lokasi Penelitian.....	44
3. Subjek dan Objek Penelitian	44
4. Teknik Pengumpulan Sampel	45
5. Metode Pengumpulan Data.....	46
a. Observasi.....	47
b. Wawancara.....	48
c. Dokumentasi	50
6. Teknik Analisis Data.....	50
a. Reduksi Data	51
b. Penyajian Data	52
c. Verifikasi Data	52
G. Uji Keabsahan Data.....	53
H. Sistematika Penulisan	55
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
A. Sejarah Ringkas Kabupaten Gunungkidul	57
1. Letak Geografis, Demografis, dan Penduduk	59
B. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.....	60
C. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Peningkatan Literasi Masyarakat Pedesaan.....	61
D. Visi-Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul ...	63
E. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.....	64
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya <i>Collaborative Governance</i> Dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi Masyarakat Kawasan Pedesaan	66
B. Proses Peningkatan Literasi Masyarakat Kawasan Pedesaan Di Kabupaten Gunungkidul	72

1. Kondisi literasi masyarakat kawasan pedesaan Kabupaten Gunungkidul sebelum <i>collaborative governance</i>	72
2. Strategi peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul	75
3. Hasil proses peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul	94
C. Model <i>Collaborative Governance</i> Dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi Masyarakat Kawasan Di DPK Kabupaten Gunungkidul.....	101
1. Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>)	102
2. Desain Institusional.....	103
3. Kepemimpinan Fasilitatif.....	104
4. Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>)	105
a. Dialog Tatap Muka	105
b. Membangun Kepercayaan.....	108
c. Komitmen Terhadap Proses (<i>Comitmen to Procces</i>).....	110
d. Kesepahaman Bersama (<i>Share Understanding</i>).....	112
e. Hasil Sementara	113
D. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi Masyarakat Kawasan Pedesaan di Kabupaten Gunungkidul	114
1. Faktor Penghambat.....	115
a. Dukungan Pemerintah Desa.....	115
b. Komitmen Pengelola.....	117
2. Faktor Pendukung	118
a. Komitmen Dari Stakeholders.....	119
b. <i>Information Sharing</i>	120
c. Bantuan Dana Pihak Swasta.....	121
BAB IV : PENUTUP	123

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul, 49.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bagan model tahapan *collaborative governance*, 31.
- Gambar 2 Peta wilayah Kabupaten Gunungkidul, 59.
- Gambar 3 Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 65.
- Gambar 4 Program satu jiwa satu pustaka (SAJISAKA), 77.
- Gambar 5 Kegiatan perpustakaan keliling dan peraturan bupati tentang pembuatan pojok baca, 80.
- Gambar 6 Perpustakaan keliling sepeda motor, 82.
- Gambar 7 Perpustakaan Gardu Pintar, 84.
- Gambar 8 Pelatihan pembuatan bunga hias dan sablon baju, 86.
- Gambar 9 Pelatihan komputer dan internet dasar bagi pengelola perpustakaan desa, 89.
- Gambar 10 *Stakeholders meeting*, 92.
- Gambar 11 Perlombaan pembuatan sinopsis dan mewarnai, 94.
- Gambar 12 Penghargaan Juara III Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Tk. Nasional Tahun 2020, 99.
- Gambar 13 Kunjungan DPK Kabupaten Kebumen dan Kulonprogo, 101.
- Gambar 14 Kegiatan *stakeholders meeting*, 107.
- Gambar 15 Alokasi APBDesa untuk honorer, 112.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan mengenai kemiskinan tentunya akan berhubungan dengan permasalahan sosial yang sejak masa lalu hingga masa kini menjadi masalah serius dalam kehidupan masyarakat. Jika pada masa lalu kemiskinan terjadi di masyarakat bukan dikarenakan kekurangan pangan melainkan miskin dalam arti kurangnya kemudahan atau materi, sementara di era modern masa kini dikatakan miskin ialah individu yang tidak memiliki akses untuk menikmati pendidikan, kesehatan, dan pelayanan yang memberikan kemudahan-kemudahan lainnya.¹ Di negara berkembang kemiskinan merupakan masalah yang cukup rumit dan belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan pembangunan yang menekankan pada peningkatan produksi dan pendapatan nasional, namun tetap saja angka kemiskinan masih tergolong tinggi.² Oleh sebab itu pengentasan kemiskinan di Indonesia tetap menjadi fokus utama dari pemerintah hingga jumlah penduduk miskin dapat diatasi.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada Maret 2020, terdapat 26,42 juta jiwa atau jika dipresentasikan sebesar 9,78 % penduduk

¹ Ikawati Ikawati dan Sri Wahyuni, "Kondisi Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 2 (Juli, 2020), 192.

² Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir", *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, Vol 11, No. 2 (2017), 27.

miskin di Indonesia.³ Angka tersebut mengalami kenaikan 1,63 juta jiwa pada September 2019 dan meningkat 1,28 juta jiwa pada Maret 2019.⁴ Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat terlebih saat ini kondisi perekonomian Indonesia mengalami pelambatan yang disebabkan oleh wabah *coronavirus disease 2019* (covid-19). Namun sebelum mewabahnya covid-19 jumlah penduduk miskin Indonesia masih termasuk dalam kategori tinggi meskipun mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya. Menariknya dari jumlah 26,42 juta penduduk miskin itu kawasan pedesaan menyumbang jumlah tertinggi sebesar 15,26 juta orang di bandingkan kawasan perkotaan sebesar 11,16 juta orang.⁵ Dari data tersebut memberikan gambaran bahwasanya kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat pada kawasan pedesaan.

Tingginya tingkat kemiskinan pada kawasan pedesaan dialami oleh hampir seluruh Provinsi yang berada di Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari hasil rilis terbaru yang dikeluarkan oleh BPS DIY, jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi DIY yakni 475,72 ribu orang atau 12,28 % per Maret 2020, di mana jumlah tersebut mengalami peningkatan 27,25 ribu orang atau sebesar 0,58% per Maret 2019.⁶ Data tersebut memberikan informasi kepada kita, sekalipun provinsi DIY merupakan ikon pendidikan dan wisata di

³ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan," dalam www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html, diakses tanggal 11 November 2020.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, "Jumlah Penduduk Miskin", dalam www.yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html, diakses tanggal 28 Januari 2021.

Indonesia, namun persentase sebesar 12,28 persen menjadikannya sebagai provinsi termiskin di pulau Jawa.⁷ Hal tersebut mengejutkan berbagai pihak mengingat provinsi DIY merupakan pemegang indeks pembangunan manusia (IPM) dengan kategori tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, yakni tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.⁸ Tetapi dengan IPM yang tinggi tidak berlaku bagi provinsi DIY, apabila merujuk kepada salah satu penyebab kemiskinan ialah tingkat pendidikan yang rendah.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang berada di Provinsi DIY dengan jumlah penduduk 736.210.⁹ Kabupaten dengan garis pantai yang relatif panjang di bagian selatan ini menjadikannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga Kabupaten Gunungkidul dikenal dengan daerah wisata pantai yang indah. Selain itu Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang kaya dengan kekhasan sejarah, budaya, dan daerah pariwisata. Dari sisi perekonomian masyarakat Gunungkidul sebagian besar berprofesi sebagai petani, tetapi 50 persen pendapatan daerah Gunungkidul berasal dari pariwisata. Melihat begitu besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul tidak serta merta menjadikan masyarakat Gunungkidul sejahtera. Hal tersebut dapat dilihat dari angka persentase kemiskinan

⁷ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, "Persentase Penduduk Miskin", dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/1/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi", dalam <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

⁹ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, "Jumlah Penduduk Miskin Ribuan", dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/79/1/jumlah-penduduk-miskin-ribuan-.html>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 sebesar 16,61 persen atau 123.08 ribu.¹⁰ Dari data tersebut menjadikan Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak dibandingkan kabupaten/kota yang berada di provinsi DIY.

Permasalahan kemiskinan masyarakat pedesaan kabupaten Gunungkidul dipicu oleh berbagai faktor, pertama kurangnya ketersediaan lapangan kerja di pedesaan.¹¹ Menurut Hartono dan Amricun Aziz, masyarakat pedesaan yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan biasanya tidak memiliki fasilitas-fasilitas untuk produksi sendiri yakni seperti lahan garapan, modal untuk berusaha, dan keterampilan yang cukup. Dalam arti pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak cukup untuk untuk mendapatkan tanah garapan maupun modal usaha.¹² Selain itu, menyebabkan masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunungkidul sulit lepas dari garis kemiskinan ialah rendahnya tingkat pendidikan.¹³ Rendahnya tingkat pendidikan ini terjadi karena sebelumnya mereka tidak sempat belajar karena kesibukan membantu orang tua bekerja untuk memperoleh penghasilan. Kesibukan dalam bekerja menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan menjadi buruh tani dan

¹⁰ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, "Persentase Penduduk Miskin Kab Gunungkidul", dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/31/1/persentase-penduduk-miskin-kab-gunungkidul.html>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

¹¹ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul", *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 04, No. 02 (Juli, 2017), 330.

¹² Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 57.

¹³ Khadafi dan Mutiarin, "Efektivitas...", 331.

buruh kasar merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Akibatnya, untuk keluar dari garis kemiskinan terjadilah migrasi besar-besaran masyarakat pedesaan ke kota.

Migrasi masyarakat pedesaan menuju ibukota bukanlah sebuah pilihan yang tepat dalam meningkatkan pendapatan. Migrasi akan memberi dampak terhadap penghasilan masyarakat perkotaan dan secara lambat laun meningkatkan kemiskinan di perkotaan.¹⁴ Selain itu migrasi masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan ekonomi akan menjadikan kawasan kota yang padat penduduk dan memunculkan permukiman kumuh.¹⁵ Oleh sebab itu diperlukan sebuah program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada masyarakat pedesaan. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya dalam rangka merealisasikan program tersebut, salah satunya dengan menyediakan akses informasi bagi masyarakat pedesaan. Dengan tersedianya akses informasi bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi pengetahuan maupun informasi yang dapat meningkatkan taraf pendapatan.

Berbicara mengenai akses informasi di masyarakat tentu akan berhubungan dengan tingkat kemampuan literasi informasi masyarakat tersebut. Kurangnya akses informasi akan berdampak terhadap tingkat kemampuan literasi masyarakat. Menurut Agus M. Irkham mengutip beberapa publikasi penelitian literasi dalam "*earthquake literacy*" dan menyimpulkan bahwa ada hubungan antara literasi informasi tinggi (melek literasi) dengan peningkatan kehidupan ekonomi.¹⁶ Kenyataannya tingkat

¹⁴ Fitri Ramdhani Harahap, "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia", *Society*, Vol. 01, No. 01 (2013), 36.

¹⁵ *Ibid.*, 40.

¹⁶ Gol A. Gong, Agus M. Irkham, *Gempa Literasi* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)

kemampuan literasi masyarakat di Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Selain kemampuan literasi yang rendah tingkat buta aksara di Indonesia juga masih tinggi, yaitu sebesar 3,29 juta orang.¹⁷ Melihat begitu rendahnya tingkat kemampuan literasi dan masih tingginya buta aksara di Indonesia wajar saja tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia masih dalam kategori tinggi.

Kemampuan literasi yang tinggi dari setiap individu membuka kesempatan untuk mengenal dunia lebih luas, memahami lingkungan sekitarnya, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan identitas budaya.¹⁸ Hal senada juga diutarakan oleh Arbarini, dkk. kemampuan literasi informasi yang tinggi atau dalam arti memadai memiliki manfaat lebih besar dibandingkan dengan individu dengan kemampuan yang rendah, yakni memiliki kesempatan kerja lebih besar, lebih aktif dalam kehidupan demokrasi, serta mempunyai tingkat kesehatan dan derajat pendidikan yang tinggi.¹⁹ Melihat begitu pentingnya manfaat dari kemampuan literasi bagi seseorang, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki sebuah program yaitu literasi untuk kesejahteraan.²⁰ Program literasi untuk kesejahteraan merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Jumlah Penduduk Buta Aksara Turun Menjadi 3,29 Juta", dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/jumlah-penduduk-buta-aksara-turun-menjadi-329-juta>, diakses tanggal 11 November 2020.

¹⁸ Kemendikbud, *Penuntasan Buta Aksara di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Paud dan Dikmas, 2013)

¹⁹ Mintarsih Arbarini, Achmad Rifai, dan Sungkowo Edy Mulyono, "Model Literasi Berbasis Entrepreneurship dalam Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan Nelayan Tradisional", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2018), 171.

²⁰ Woro Titi Haryanti, "Memperkuat Literasi untuk Kesejahteraan Masyarakat," dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/236045/memperkuat-literasi-untuk-kesejahteraan-masyarakat>., diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

kemampuan literasi masyarakat sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensinya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis perpustakaan.²¹

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan literasi informasi bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Terlebih pada masyarakat pedesaan tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan baik dari sisi akses ke informasi maupun ketersediaan fasilitas yang tersedia. Seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo dan Saepudin, masyarakat di Indonesia yang berada di kawasan pedesaan sebagian besar diluputi oleh sindrom kemiskinan.²² Kemiskinan pada masyarakat pedesaan telah masuk dalam kategori yang sangat kompleks dan faktor-faktor penyebab kemiskinan saling berkaitan, seperti pendapatan yang rendah, serta jumlah pengangguran dan buta huruf yang tinggi.²³ Diperlukan keterlibatan atau kolaborasi semua pihak agar angka kemiskinan dan buta huruf dapat diturunkan. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan memiliki potensi keberhasilan lebih besar jika dijalankan secara bersama-sama. Begitu juga dalam peningkatan kemampuan literasi masyarakat, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, *stakeholders*, dan masyarakat.

Pemerintah kolaboratif (*collaborative governance*) sangat diperlukan untuk menggapai tujuan. *Collabarative governance* merupakan sebuah usaha yang dalam

²¹ *Ibid.*

²² Encang Saepudin, "Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bandung", *Sosiohumaniora*, Vol. 20, No. 01 (Maret, 2018), 86.

²³ *Ibid.*

pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu pihak, di mana pihak (*stakeholders*) yang terkait memiliki tujuan yang sama untuk mengusung kepentingan instansi masing-masing secara bersama-sama.²⁴ Secara langsung *collaborative governance* merupakan sebuah kesepakatan antara lembaga publik dengan lembaga *non* negara atau lembaga publik dengan lembaga yang memiliki tujuan melahirkan atau merealisasikan sebuah kebijakan untuk masyarakat atau menjalankan program maupun mengelola sebuah aset. Hal inilah yang mendasari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul untuk ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan melalui peningkatan literasi informasi. Dari hasil observasi peneliti di DPK Kabupaten Gunungkidul, peneliti mewawancarai kepala bidang perpustakaan yang menyebutkan bahwa peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan secara kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah dan sektor swasta.²⁵ Saat ini berbagai *stakeholders* telah berkolaborasi dengan DPK Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta, Telkom, Dinas Pertanian dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa, Perpustakaan Desa, serta *Coca-Cola Foundation Indonesia* (CCFI) dengan program PerpuSeru.

²⁴ Ranggi Ade Febrian, “Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)”, *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. 02, No. 02 (2016), 201.

²⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan DPK Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 05 April 2021.

Peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yang digagas oleh DPK Kabupaten Gunungkidul melalui *collaborative governance* saat ini telah berhasil memberikan dampak positif. *Collaborative governance* dalam peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul telah berhasil menjadikan perpustakaan desa tidak hanya sebatas tempat membaca, tetapi juga sebagai wadah masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian. Sebagai contohnya pada Perpustakaan Balai Pintar Desa Pengkol yang berinovasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menganyam dengan memanfaatkan kain perca untuk membuat keset dan pelatihan menari setiap hari Sabtu dan Pembelajaran Bahasa Inggris setiap hari Minggu. Di mana inovasi di bidang kepastakaan perpustakaan desa Pengkol tersebut telah meraih prestasi di tingkat nasional dengan menyabet peringkat tiga pada ajang perlombaan perpustakaan umum terbaik (Desa/Kelurahan) pada tahun 2020. Selain Desa Pengkol, terdapat juga Desa Sambirejo dengan Perpustakaan Indika yang sukses dalam menjadikan perpustakaan desa sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh Perpustakaan Indika di antaranya pelatihan pengolahan daun kelor, pembelajaran aplikasi komputer *coreldraw* bagi remaja, dan mengadakan sekolah alam. Kedua perpustakaan merupakan contoh dari keberhasilan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui metode kolaborasi.

Keberhasilan yang diraih tersebut tentunya tidak terlepas dari terlepas dari bagaimana model *collaborative governance* yang dijalan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul dan *stakeholders* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan

pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. Selain model *collaborative governance* yang dijalankan, faktor-faktor pendukung maupun penghambat di dalam pelaksanaan tentunya mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance*. Untuk itu berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik menggali lebih dalam *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Tesis ini akan membahas secara rinci mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya *collaborative governance* dalam peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, bagaimana proses peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, bagaimana model *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. Argumen saya, kolaborasi pemerintah yang dijalankan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan berjalan dengan baik, baik dalam hal peningkatan kemampuan literasi informasi maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian-kajian yang berkaitan dengan literasi informasi dan manajemen pengelolaan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang diteliti ialah:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi DPK Kabupaten Gunungkidul melaksanakan *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana proses peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di kabupaten gunungkidul?
3. Bagaimana model *collaborative governance* yang dijalankan DPK Kabupaten Gunungkidul dengan pihak terkait dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul?
4. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi DPK Kabupaten Gunungkidul melaksanakan *collaborative governance* dalam peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul?
 - b. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis bagaimana proses peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di kabupaten gunungkidul?

- c. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis bagaimana model *collaborative governance* yang dijalankan DPK Kabupaten Gunungkidul dengan pihak terkait dalam peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul?
 - d. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *collaborative governance* peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul?
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Akademik, yakni berguna bagi peneliti sebagai syarat meraih gelar *Master Of Arts* (M.A) pada Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - b. Kegunaan bagi lembaga, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui secara rinci mengenai kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan kawasan pedesaan melalui peningkatan literasi informasi.
 - c. Kegunaan ilmiah, yakni sebagai khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu perpustakaan dan Informasi, serta bahan masukan bagi perpustakaan umum dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui peningkatan literasi informasi.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka memiliki tujuan untuk mengenalkan pembaca pada penelitian terdahulu yang memiliki hubungan atau kaitan erat dengan penelitian ini. Selain itu tujuan dari kajian terdahulu ialah sebagai upaya peneliti untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian pada tesis ini. Penelitian mengenai *collaborative governance* selalu menarik untuk dilakukan penelitian, terlebih dalam hal ini dikaji disiplin ilmu perpustakaan dalam hal pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan melalui peningkatan literasi informasi. Dari hasil penelusuran terhadap literatur terdahulu yang dilakukan peneliti, didapati penelitian sejenis yang memiliki kaitan dengan topik *collaborative governance* yang menjadi titik acuan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah.²⁶ Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pendekatan kolaboratif dalam upaya menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia yang dijalankan oleh pemerintah baik pusat, daerah, hingga desa, serta terciptanya kerja sama dengan pihak swasta melalui CSR pada wilayah pesisir yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dari penelitian tersebut didapati bahwa proses kolaboratif yang dilakukan antar *stakeholders* melalui program kampung sejahtera. Program tersebut digagas oleh lembaga swasta OASE dengan

²⁶ Siti Yulyanah dan Riska Sarofah, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod", *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2019), 1-6.

berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dan dan pemerintah daerah. Melalui program tersebut menjadikan desa Kohod memiliki infrastruktur yang cukup memadai, selain itu program kampung sejahtera juga meningkatkan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dalam hal. Bagi peneliti sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah memberikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Walaupun penelitian Siti Yulyanah dan Riska Sarofah menginspirasi peneliti, namun penelitian ini tidak serta merta memiliki kesamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah berfokus kepada pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir melalui pendekatan kolaboratif pemerintah dan *stakeholders*. Sedangkan penelitian pada tesis ini yaitu *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan dari lokasi, di mana peneliti berfokus kepada pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah berfokus kepada pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

Kedua, penelitian oleh Yanuar, dkk. dalam Jurnal Pustaka Budaya pada tahun 2018.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kawasan

²⁷ Yanuar Yoga Prasetyawan et al., "Peran Perpustakaan Umum Kabupaten Gunung Kidul Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Pustaka Budaya*, Vol. 05, No. 01 (Februari, 2018), 53–60.

pesisir yakni yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Gunungkidul yang berada di pesisir Gunungkidul masih relatif mengkhawatirkan, sebab sebagian besar hasil kerja nelayan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nelayan itu sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari pendidikan berdampak terhadap banyaknya remaja usia sekolah tidak meneruskan pendidikannya pada jenjang lebih tinggi, tetapi malah memilih merantau untuk mencari pekerjaan ke kota-kota besar. Dalam mengatasi hal tersebut, Perpustakaan Umum Gunungkidul menjalankan beberapa program yang berbentuk pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan membuat dan pelatihan pemasaran produk secara *online*. Selain itu Perpustakaan Umum Gunungkidul juga memiliki program perpustakaan keliling pada kawasan terpencil dan pesisir, serta program *one home one library* dalam rangka pemenuhan dan pemerataan informasi masyarakat. Program-program yang dijalankan oleh Perpustakaan Umum Gunungkidul tidak hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat semata, tetapi juga memiliki program yang dapat meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup khususnya pada sektor pendidikan dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar, dkk memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian pada tesis ini. Perbedaannya, penelitian oleh Yanuar, dkk. tidak menganalisis atau membahas mengenai *collaborative governance*, namun meneliti peran dari Perpustakaan Umum Kab. Gunungkidul dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pada kawasan pesisir Yogyakarta. Sedangkan penelitian pada tesis ini merupakan penelitian yang menganalisis mengenai

collabotive governance dalam peningkatan kemampuan literasi masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu perbedaannya pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Yanuar, dkk hanya sebatas masyarakat pesisir Gunungkidul, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti pada masyarakat pedesaan Gunungkidul. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian bertujuan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat dan lokasi kabupaten yang sama yaitu Gunungkidul yakni melalui DPK Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga, penelitian oleh Mistarsih Arbaini, dkk dalam jurnal ilmiah pada *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* pada tahun 2018.²⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Mistarsih Arbaini, dkk bertujuan untuk membentuk model literasi berbasis ke wirausahawan dalam meningkatkan pendapatan istri para nelayan. Dari penelitiannya tersebut, adapun model pengembangan literasi berbasis *entrepreneurship* yang diperlukan oleh istri nelayan ialah model literasi yang digabungkan dengan kegiatan keterampilan ekonomi, yaitu pelatihan berwirausaha terhadap para istri nelayan. Pelatihan tersebut berkaitan dengan berhubungan dengan olahan produk yang berbahan ikan seperti ikan asap, sosis ikan, ikan asin, krispi ikan, burger ikan, bakso ikan, dan olahan makanan berbahan ikan lainnya. Penelitian oleh Mistarsih Arbaini, dkk memiliki perbedaan dan permasalahan dengan penelitian pada tesis ini. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menggunakan *collaborative governance*. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bagi

²⁸ Arbarini, Rifai, dan Mulyono, "Model ...", 170-178.

masyarakat, namun di dalam penelitian ini lebih kepada istri nelayan dengan kata lain pemberdayaan wanita. Selain itu persamaan lain penelitian Mistarsih Arbaini, dkk. dengan tesis ini yakni menggunakan pendekatan kemampuan literasi di dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

E. Kajian Teori

1. Pengertian *Collaborative Governance*

Sebelum membahas teori mengenai *collaborative governance* secara lebih mendalam, perlu dijelaskan maksud dari *governance* terlebih dahulu. Pengertian *governance* perlu dijelaskan karena istilah *governance* merupakan dasar dari *collaborative governance*. Hal ini dilakukan untuk mencari makna yang lebih spesifik dan menghindari kebingungan bagi peneliti dan pembaca. Secara bahasa *governance* diambil dari kata latin yakni *gubernare*, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *govern* yang memiliki arti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarah), atau *rule* (memerintah). Sementara secara kata *governance* dalam bahasa Inggris ialah *to rule authority* (memerintah dengan kewenangan). Pada penelitian ilmu pemerintahan, kerap kali terdapat dua istilah "*government*" dan "*governance*". Kedua istilah ini hampir mirip tetapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. *Geverment* hanya mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi semata dalam penyelenggaraan pemerintah, posisi atau peran masyarakat hanya semata-

mata sebagai penerima pelayanan.²⁹ Sedangkan *governance* lebih luas, yakni penyelenggaraan pemerintah tidak hanya diperankan oleh lembaga pemerintah atau birokrasi semata, melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak lain non pemerintah.³⁰ Secara garis besar, *governance* mencakup keseluruhan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah serta unsur sosial.³¹ Mengacu pada beberapa poin di atas, bahwasanya *governance* ialah sebuah gaya pemerintahan bersifat dinamis. Dapat dikatakan, *governance* memberikan peran atau ruang bagi lembaga lain untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan, lembaga pemerintah bukanlah satu-satunya yang memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, pemerintahan kolaboratif merupakan sebuah usaha yang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders* yang saling terikat untuk mencapai tujuan bersama.³² Dari pengertian ini tidak disebutkan mengenai jenis organisasi yang terperinci yang terlibat dalam proses tersebut. Namun pada umumnya kerja sama yang melibatkan berbagai organisasi dalam mencapai tujuan yang telah disetujui secara bersama yakni dengan

²⁹ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 2.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), 1.

³² Agustinus Subarsono, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Gava Medina, 2016), 174.

pengaktualisasian kapabilitas dari setiap organisasi tersebut.³³ Sedangkan menurut Ansell dan Grash, *collaborative governance* merupakan jenis tata kelola di mana lembaga publik dan lembaga non publik bekerja secara kolektif yang bersifat formal dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik atau mengelola sebuah aset publik, yang dalam implementasinya diikat dengan sebuah konsensus.³⁴ Definisi yang diutarakan oleh Ansell dan Grash, jika dirumuskan terdapat beberapa kata kunci karakteristik dari *collaborative governance* yaitu:³⁵

- a. Forum digagas dan dijalankan oleh lembaga atau badan-badan publik maupun pelaku dari lembaga tersebut.
- b. Terdapat aktor non publik di dalam forum tersebut.
- c. Dalam pengambilan keputusan melibatkan seluruh anggota forum, di mana pengambilan keputusan tersebut haruslah persetujuan bersama.
- d. Forum diselenggarakan secara resmi dan bersama-sama
- e. Forum berorientasi pada konsensus yang telah disepakati.
- f. Kolaborasi berfokus pada kepentingan publik seperti kebijakan publik atau manajemen publik.

Definisi yang diutarakan oleh Ansell dan Grash menjelaskan bahwasanya terbentuknya forum disebabkan adanya keterikatan formal,

³³ *Ibid*, 175

³⁴ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in theory and practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4 (November, 2007), 545.

³⁵ Subarsono, *Kebijakan Publik dan*, 175-176.

sehingga forum hanya melibatkan atau diisi oleh lembaga publik, dan aktor-aktor baik lembaga publik tersebut maupun aktor non publik. Sedangkan menurut Agrawal dan Lemos, *collaborative governance* tidak semata-mata hanya melibatkan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, melainkan adanya keterlibatan masyarakat pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan publik atau dengan kata lain terbentuknya *collaborative governance* atas adanya *multipartner governance*.³⁶ Dengan kata lain perumusan keputusan kebijakan publik yang dihasilkan dari *collaborative governance* haruslah melibatkan aktor-aktor yang meliputi berbagai sektor atau level, baik sektor pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat sipil.

Robertson dan Choi dalam Kumorotomo memberikan definisi *collaborative governance* yakni sebuah proses yang dikerjakan secara bersama-sama dan setiap partisipasi memiliki derajat maupun otoritas yang sama dalam pengambilan keputusan, selain itu setiap partisipan kesempatan dalam menjalankan aspirasinya pada proses tersebut.³⁷ Sedangkan Dwiyanto menjelaskan bahwasanya di dalam proses kerja sama *collaborative governance* terjadi adanya penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas dari

³⁶ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 22, No 1 (Januari, 2012), 3.

³⁷ Wahyudi Kumorotomo, dkk., *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik* (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2013), 10.

setiap pihak, selain itu setiap partisipan memiliki otoritas dalam mengambil keputusan tanpa ada intervensi dari pihak lain dan otoritas dalam mengelola manajemen organisasi sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁸ Sejalan dengan Dwiyanto, Sink menjelaskan *collaborative governance* merupakan sebuah usaha untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang dikerjakan secara bersama-sama oleh kumpulan berbagai organisasi, di mana solusi tersebut tidak dapat dicapai secara individu atau perseorangan.³⁹ Kedua pengertian yang dijelaskan di atas memiliki makna dan tujuan sama, yakni setiap partisipan yang berkomitmen dalam *collaborative governance* mengusung kepentingan dari lembaga masing-masing dan menawarkan solusi dalam sebuah permasalahan maupun perumusan sebuah kebijakan.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan *collaborative governance* ialah sebuah usaha memecahkan permasalahan yang di dalamnya melibatkan berbagai pihak terkait. Pihak terkait tersebut tidak hanya sebatas lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Namun, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam semua perumusan dan proses pengambilan keputusan. Terjadi sebuah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak disebabkan kurangnya kapasitas, sumber daya manusia, dan jejaring yang dimiliki oleh setiap partisipan, sehingga

³⁸ Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, 251.

³⁹ *Ibid*

dengan adanya sebuah kerja sama dapat melengkapi kekurangan tersebut dan tujuan dari kerjasama dapat dicapai secara bersama-sama. Selain itu, kedudukan setiap pihak dalam perumusan sebuah kebijakan baik visi-misi, norma, dan tujuan dari kerja sama ialah setara dan bersifat independen.

a. Prinsip *Collaborative*

Pada sebuah kerja sama yang bersifat kemitraan dibutuhkan sebuah arahan dan landasan yakni berupa prinsip dari kerja sama tersebut, di mana prinsip tersebut bertujuan agar setiap pihak yang tergabung mengetahui tanggung jawab serta memahami peran dari masing-masing pihak.⁴⁰ Menurut Suharyanto, segala kesepakatan yang telah disusun dan disepakati haruslah dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan prinsip bersama, adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal ini antara lain:⁴¹

1) Koordinasi dan integrasi kebijakan fiskal, anggaran dan sektor riil

Pemerintah dapat mendorong efisiensi, produktivitas, stabilitas, dan distribusi yang adil serta pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui perangkat kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Dengan kebijakan dalam pendapatan negara serta didukung dengan kebijakan peredaran uang yang tepat dapat menyukseskan

⁴⁰ Subarsono, *Kebijakan Publik dan*, 185.

⁴¹ Suharyanto, *Administrasi Publik: Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reiventing Gouvernance* (Yogyakarta: Media Wacana, 2005), 92.

kegiatan seperti program pemberdayaan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, penguasaan iptek, serta meningkatkan kapasitas dan perekonomian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan diberbagai aspek sistem pengelolaan kemiskinan pada masyarakat modern.

Pada perpustakaan anggaran merupakan kebutuhan primer bagi keberlangsungan sebuah perpustakaan. Sehingga perpustakaan yang memiliki keterbatasan dalam anggaran tentunya kegiatan menggalang atau menghimpun dana menjadi sebuah aktivitas yang paling ensensial. Menurut Kalida, perpustakaan yang tidak melakukan penggalangan dana baik dari pemerintah maupun swasta akan menjadi kurang efektif, bahkan bisa mati.⁴² Lebih lanjut Kalida menambahkan, ketika peprustakaan tidak mengadakan penggalanagan dana, maka perpustakaan tersebut tidak akan memiliki sumber daya, jika perpustakaan tidak memiliki sumber daya, maka perpustakaan tidak dapat menjaga eksistensin dan kelangsungan programnya.⁴³ Sehingga tanpa adanya program menjadikan perpustakaan akan lemah, dan jika tidak diatasi perpustakaan akan mati.

2) Pemberdayaan (*empowering*)

⁴² Muhsin Kalida, *Penguatan Lembaga Perpustakaan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 69

⁴³ *Ibid.*

Kurangnya potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat menjadi penghalang terbesar dalam meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari garis kemiskinan. Keterbatasan pada modal, pemasaran, dan teknologi menjadi sebuah kelemahan yang harus diatasi. Salah satu caranya ialah melalui program pemberdayaan dari pemerintah dan swasta. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah dapat berperan sebagai pengurang hambatan dan kendala dalam partisipasi masyarakat serta sebagai pembuat program bagi masyarakat yang berorientasi pada proses pembelajaran sosial (*social learning process*).

b. Alasan Terlaksananya *Collaborative Governance*

Praktik tata kelola pemerintahan saat ini membutuhkan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Ada banyak alasan di balik terjadinya kerja sama antara masing-masing lembaga atau institusi.

Collaborative governance tidak semata-mata begitu saja terjadi, terjadinya *collaborative governance* disebabkan oleh inisiatif semua pihak untuk mendorong kerja sama dan pengorganisasian guna mengentaskan problem yang sedang terjadi di masyarakat.⁴⁴

Collaborative governance atau kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan respon dari tidak berjalannya sebuah

⁴⁴ Junaidi, "Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang", *Jurnal Umrah*, (Agustus, 2015), 8.

implementasi, biaya tinggi, maupun politisasi regulasi. Bahkan dapat dikatakan dengan pasti bahwa trend kerja sama berasal dari pengembangan kemampuan keilmuan dan kelembagaan.⁴⁵ Selanjutnya menurut Ansell dan Grash dalam Sudarmo, *collaborative governance* hadir secara adaptif yaitu sesuai dengan kondisi yang sedang dialami, adapun alasan-alasan terbentuknya *collaborative governance* yaitu:⁴⁶

- 1) Sistem yang rumit dan saling ketergantungan.
- 2) Potensi dan bentrokan yang tidak dapat diatasi antar kelompok kepentingan
- 3) Berusaha menciptakan metode baru dalam mendapatkan legitmasi politik.
- 4) Ketidakberhasilan dalam menerapkan suatu kebijakan.
- 5) Ketidaksanggupan suatu lembaga terutama disebabkan oleh diferensiasi sistem kekuasaan, yang mencegah mereka menggunakan area kelembagaan lain untuk menghalangi pengambilan keputusan.
- 6) Memobilisasi kelompok kepentingan.
- 7) Peraturan berbiaya tinggi dan dipolitisasi.

⁴⁵ Ansell dan Gash, "Collaborative Governance in, 544.

⁴⁶ *Ibid.*

Sementara menurut Fendt, terdapat tiga alasan suatu lembaga atau organisasi melakukan kolaborasi, yaitu:⁴⁷

- 1) Suatu lembaga atau organisasi melaksanakan kolaborasi tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan dari pihak lain.
- 2) Melalui kolaborasi, keuntungan yang didapatkan organisasi atau lembaga dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.
- 3) Melalui berkolaborasi, lembaga atau organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa karena kompleksitas saling ketergantungan masing-masing lembaga, maka kerja sama diakui. Karena adanya perbedaan kepentingan di antara masing-masing kelompok, diyakini pula telah terjadi kolaborasi yang melahirkan kolaborasi. Kerja sama semacam itu dapat memobilisasi kelompok kepentingan. Karena keterbatasan lembaga, kolaborasi dianggap sebagai jalan keluar atas buruknya implementasi dari sebuah rencana atau kegiatan yang dilaksanakan hanya dengan satu lembaga. Selain itu,

⁴⁷ Thomas Christian Fendt, *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries* (Berlin: Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin, 2010), 22.

kolaborasi juga dilihat sebagai solusi biaya tinggi untuk suatu solusi atau aktivitas.

c. Model *Collaborative Governance*

Pada proses kolaborasi tentunya memiliki tahapan yang terjadi di antara para aktor pemangku kepentingan. Untuk mengetahui tahapan yang terjadi pada proses kolaborasi tersebut dapat dilihat melalui proses yang terjadi di dalam forum. Kehadiran forum pada sebuah kolaborasi bertujuan sebagai wadah dalam melakukan koordinasi para aktor dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan dengan tingkat literasi yang tinggi merupakan tujuan dari kolaborasi dan harus diwujudkan secara bersama-sama.

Menurut Carlson tahapan dalam proses *collaborative governance* dimulai sejak tugas yang diberikan oleh pimpinan *stakeholders* didasarkan pada apa yang dilakukan baik sebelum, selama, dan sesudah terjadi. Penjelasan lebih lanjut dari yang dikemukakan oleh Chrislip bahwasanya tahapan kolaborasi meliputi bagaimana memulai, menyiapkan keberhasilan, bekerja bersama, dan mulai melakukan aksi. Secara umum terdapat empat tahap dalam *collaborative governance* yakni, *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*. Dari beberapa pendapat di atas terdapat satu pendapat yang memperkuat teori sebelumnya yaitu yang dikemukakan oleh Ansell and Gash, yang mana terdapat tiga tahapan di dalam proses kolaborasi yaitu kondisi awal, proses

dan *outcome* atau kemanfaatan. Adapun penjelasan mengenai ketiga tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Kondisi awal

Pengetahuan atau informasi mengenai kondisi awal sangat penting untuk menentukan kebijakan yang diambil dalam proses kolaborasi. Dalam kolaborasi kondisi awal dipengaruhi oleh beberapa atribut yakni meliputi *stakeholders* memiliki tujuan dan visi yang harus dicapai, sejarah masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

b. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi menurut Ansel and Gash terbagi ke dalam lima tahap, yaitu:

1) Dialog tatap muka

Dialog tatap muka merupakan salah satu tahap dalam proses kolaborasi yang sangat di perlukan. Dalam dialog tatap muka perbedaan pandangan di antara para aktor sering terjadi, sehingga diperlukan dialog tatap muka untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama.

2) Membangun kepercayaan

Dalam *collaborative governance*, proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan komitmen yang

panjang. Oleh sebab itu, jika ada antagonisme antar stakeholders pada kerjasama sebelumnya, maka pembuat kebijakan harus membangun kepercayaan kembali. Selanjutnya, jika kepercayaan antar *stakeholders* tidak dibangun atau tidak ada, maka proses kolaboratif tidak akan dapat terlaksana.

3) Komitmen pada proses

Komitmen yang diberikan oleh setiap *stakeholders* menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi. Seluruh *stakeholders* harus dapat mematuhi hasil musyawarah dan menjalankan tanggung jawab yang telah diputuskan dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen terhadap proses merupakan konsekuensi atas keterlibatan dari masing-masing anggota dalam forum.

4) Pemahaman bersama

Pada proses kolaboratif pemangku kepentingan harus dapat mengembangkan pemahaman bersama. Dalam hal ini, pemahaman bersama tersebut berupa visi bersama, misi yang sama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyesuaian nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada definisi masalah.

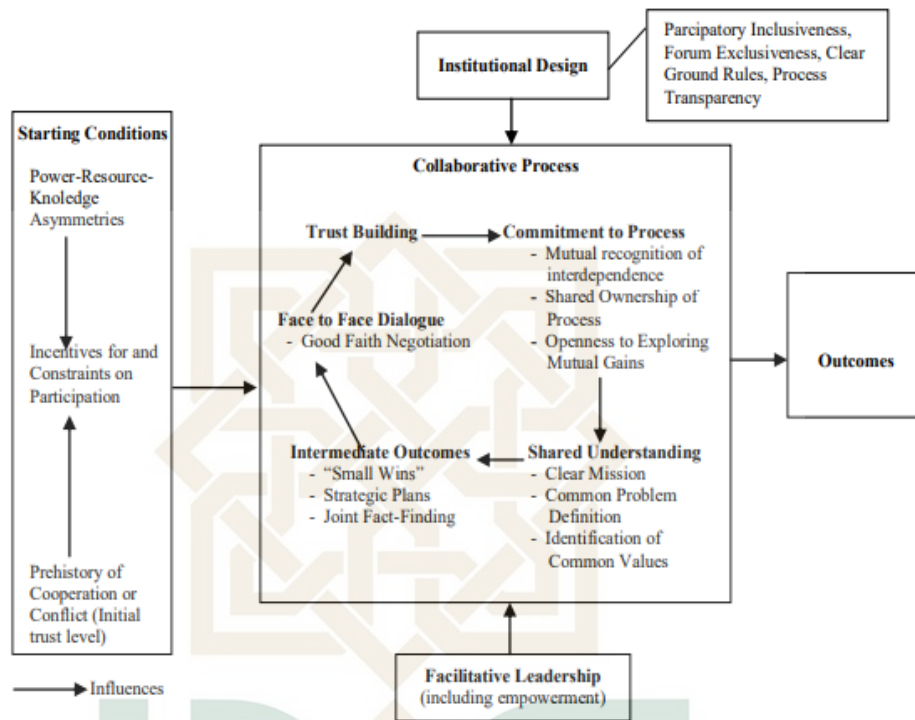
5) Hasil sementara

Hasil sementara merupakan apa yang didapatkan sementara selama proses kolaborasi berlangsung. Dalam hal ini, kolaborasi akan terjadi apabila tujuan maupun keuntungan dari kolaborasi tersebut berdampak nyata hasil yang dirasakan atau bersifat konkrit.

c. *Outcomes* atau manfaat

Outcomes atau manfaat merupakan keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi antar stakeholders dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk memberikan gambaran agar mudah dipahami, berikut bagan model tahapan *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash:



Gambar 1. Bagan model tahapan *collaborative governance*

d. Hambatan dalam *Collaborative Governance*

Berbagai faktor dapat menjadi penghambat ataupun gagalnya *collaborative governance* yang sudah dibangun dan dijalankan.

Menurut Newman dalam penelitiannya bahwa partisipasi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagalnya *collaborative governance*.⁴⁸ Temuan tersebut menyatakan bahwa partisipasi menjadi

suatu hal yang penting dalam sebuah *collaborative governance*, tetapi

⁴⁸ Janet Newman, Marian Barnes, Helen Sullivan, Andrew Knops, "Public participation and collaborative governance". *Journal of Social Policy*, Vol. 33, No. 2 (Maret, 2004), 210.

juga bisa menjadi faktor kendala dalam sebuah *collaborative governance* itu sendiri apabila tidak ada partisipasi dari masing-masing *stakeholders*. Selanjutnya Sudarmo menyatakan sejumlah faktor yang mampu menghambat terlaksananya kolaborasi dalam *governance*. Faktor-faktor tersebut seperti faktor struktur sosial, faktor kultural dan faktor kepentingan pemerintah yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.⁴⁹

Pertama, terkait dengan faktor struktur sosial, kolaborasi bisa gagal disebabkan karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Institusi ataupun *stakeholders* yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertical, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertical, tidak pas untuk kolaborasi yang mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non-pemerintah.

⁴⁹ Sudarmo, *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance* (Surakarta: Smart Media, 2011), 117

Kedua, terkait dengan faktor kultural (budaya) dapat dilihat bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada produsen dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko. Untuk terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan publik untuk memiliki *skills* (keterampilan) dan kesediaan untuk berbaaur masuk ke kemitraan secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektifitas kolaborasi.

Ketiga, terkait dengan faktor kepentingan pemerintah erat kaitannya dengan faktor politik kepentingan diantara masing-masing pemangku kepentingan. Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompokkelompok yang berkolaborasi tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain.

2. Literasi Informasi

Literasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *literacy*, di mana kata *litercy* tersebut berasal dari bahasa latin yaitu *litera* atau huruf, dalam hal ini sering dipahami sebagai keaksaraan. Secara harfiah literasi

diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Umumnya, orang yang bisa membaca dan menulis disebut buta huruf, dan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut buta huruf atau buta huruf. Menurut Kern, literasi adalah melek huruf (kemampuan untuk membaca dan menulis).⁵⁰ Selain itu literasi juga memiliki arti yang sama dengan belajar dan memahami sumber bacaan. Lebih lanjut lagi Kern menjelaskan, bahwasanya literasi merupakan peristiwa sosial, historis, serta situasi kebudayaan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks.⁵¹ Literasi membutuhkan setidaknya kepekaan yang terbukti dengan sendirinya terhadap konteks antara konvensi tekstual dan penggunaannya idealnya, hubungan ini perlu direfleksikan secara kritis. Peka terhadap maksud/tujuan, literasi bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi antar komunitas dan budaya, serta di dalam dan antar budaya.⁵² Keaksaraan membutuhkan berbagai keterampilan kognitif, pengetahuan bahasa tertulis dan lisan, pengetahuan genre dan pengetahuan budaya.⁵³ Hal tersebut serupa dengan yang di kemukakan oleh Ramdhoni, literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi

⁵⁰ Richard Kern, *Literacy & Language Teaching* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, 67.

⁵³ *Ibid.*

dalam bentuk tulisan.⁵⁴ Berdasarkan pendapat di atas, secara mendasar dapat dijelaskan bahwa literasi adalah suatu kegiatan sosial, dengan keterampilan menciptakan dan menjelaskan makna melalui teks. Literasi membutuhkan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan memperoleh informasi dalam bentuk tertulis.

a. Jenis Literasi

Literasi sudah mulai digunakan secara lebih luas, namun tetap mengacu pada literasi atau kemampuan dasar yaitu membaca dan menulis. Intinya, hal terpenting dari kata literasi adalah bebas dari buta huruf agar dapat memahami semua konsep secara fungsional, dan cara untuk memperoleh kemampuan literasi tersebut adalah melalui pendidikan. Clay menjelaskan bahwa literasi terdiri dari literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual. Adapun komponen-komponen literasi menurut penjelasan Clay adalah sebagai berikut.⁵⁵

1) Literasi dini (*Early Literacy*)

Pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial menentukan kemampuan mereka untuk mendengarkan bahasa lisan dan berkomunikasi dengan gambar melalui bahasa

⁵⁴ Ali Romdhoni, *Al-Qur'an dan Literasi* (Gombong: Linus, 2013), 90.

⁵⁵ M. M Clay, *Change over Time in Children's Literacy Development* (Portsmouth: -, 2001), 10–11.

lisan. Pengalaman seseorang dalam berkomunikasi dalam bahasa ibu menjadi dasar pengembangan keterampilan literasi dasar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi dini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bahasa, serta literasi dapat memudahkan anak dalam berkomunikasi dalam bahasa dan gambar di lingkungannya.

2) Literasi Dasar (*Basic Literacy*)

Mampu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung. Di antara keterampilan literasi dasar, kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis dan berhitung berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan, memahami informasi, mengkomunikasikan dan mendeskripsikan informasi berdasarkan pemahaman dan menarik kesimpulan.

3) Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*)

Perpustakaan harus lebih maju, lebih menarik dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu; menambah fasilitas, materi pembelajaran dan kemampuan pelayanan. Komunitas literasi merupakan pendukung yang efektif untuk pengembangan budaya belajar. Perpustakaan yang baik harus dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran, bahkan sebagai penggerak perubahan komunitas.

4) Literasi Media (*Media Literacy*)

Memiliki kemampuan memahami berbagai media (seperti media cetak, media elektronik, media digital) dan memahami tujuan penggunaan teknologi. Melalui media literasi, masyarakat dapat secara aktif mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan bahan referensi yang ada, sehingga dapat meningkatkan tingkat pengetahuannya, sehingga informasi yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

5) Literasi Visual (*Visual Literacy*)

Dengan pemahaman tingkat tinggi tentang literasi media dan literasi teknis, mereka menggunakan materi audiovisual dengan cara yang kritis dan bermartabat. Interpretasi materi visual yang dibanjiri setiap hari di media cetak di TV dan Internet harus dikelola dengan baik. Namun, ia perlu menyaring banyak manipulasi dan hiburan berdasarkan etika dan kesesuaian.

6) Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)

Memahami kemampuan untuk mengikuti integritas teknis perangkat keras, perangkat lunak, dan etika saat menggunakan teknologi. Selanjutnya kita akan belajar tentang percetakan, presentasi dan teknologi akses Internet. Dalam prakteknya saya juga memiliki pemahaman tentang penggunaan komputer (*computer literacy*), termasuk menyalakan dan mematikan komputer, menyimpan mengelola data, dan menjalankan program

perangkat lunak. Berdasarkan definisi ini, literasi teknis dapat dijelaskan sebagai sejenis kemampuan yang terdiri dari sains, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan mengambil keputusan, yang ditujukan untuk secara efektif menggunakan teknologi/inovasi manusia, terutama di bidang pendidikan.

b. Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat

Kebiasaan literasi yang dimiliki oleh setiap individu tidak begitu saja ada dan tingkat literasi satu individu dengan individu yang lain berbeda. Agar kebiasaan membaca menjadi budaya diperlukan strategi dalam meningkatkannya. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang telah diberikan amanat sebagai pengelola informasi harus dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat. Menurut Muslim, adapun strategi yang dapat dijalankan oleh perpustakaan agar meningkatkan literasi masyarakat yaitu;⁵⁶

1) Menyelenggarakan kegiatan buku bergilir

Perpustakaan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sedikit “paksaan” untuk mengikuti kegiatan, dengan cara menyelenggarakan kegiatan buku bergilir.

Perpustakaan dapat mengantarkan buku-buku yang menarik berdasarkan *survey* kebutuhan ke rumah-rumah masyarakat, lalu

⁵⁶ Budiman Muslim, "Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat", *Jurnal Imam Bonjol Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol 2, No 2 (2018), 96.

setiap jangka waktu yang ditentukan buku-buku tersebut dipergilirkan dari rumah satu ke rumah yang lainnya.

2) Menyelenggarakan perpustakaan keliling

Wilayah geografis yang luas dan beragam kondisinya ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan layanan perpustakaan secara merata. Oleh karena itu perpustakaan dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling. Kegiatan ini dapat memanfaatkan kendaraan yang dimiliki oleh perpustakaan yang bersangkutan.

3) Memberdayakan masyarakat

Menyelenggarakan program sumbangan buku (*book charity*) perpustakaan perlu memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan literasi masyarakat yaitu dengan menyelenggarakan sumbangan buku (*book charity*) atau istilah lain seperti donasi buku, wakaf buku, dan lain-lain. Perpustakaan terlebih dahulu mendata masyarakat atau tokoh masyarakat yang berpotensi mendonasikan uangnya atau buku yang dimilikinya.

4) Memasyarakatkan perpustakaan dan pentingnya budaya gemar membaca

Kesadaran akan pentingnya informasi dalam kehidupan bagi masyarakat pra informasi sangat rendah, apalagi kesadaran akan pentingnya perpustakaan. Maka perpustakaan perlu melakukan sosialisasi perpustakaan kepada masyarakat

5) Memberdayakan perpustakaan masyarakat

Perpustakaan perlu membina dan memberdayakan perpustakaan masyarakat dilingkungannya, baik itu perpustakaan kelurahan, desa, perpustakaan komunitas, taman bacaan, atau pojok baca masyarakat. Sosialisasi perpustakaan dilakukan untuk memperkenalkan fungsi, pelayanan dan jasa serta mendorong minat baca melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan secara maksimal.

Sementara di dalam Panduan Gerakan Literasi Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat lima komponen strategi yang mendukung terlaksananya Gerakan Literasi Nasional, yaitu kapasitas fasilitator, jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, pelibatan publik, serta tata kelola.⁵⁷ Kelima strategi ini diterapkan di setiap ranah literasi yakni pada gerakan literasi keluarga, sekolah dan masyarakat yang disesuaikan menurut kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

1) Penguatan Kapasitas Fasilitator

Fasilitator literasi merupakan ujung tombak gerakan literasi yang membantu dan mendorong masyarakat Indonesia dalam menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan.

⁵⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Gerakan Literasi Nasional* (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 17.

Pada ranah keluarga, fasilitator literasi terdiri atas orang tua dan atau anggota keluarga. Pada ranah sekolah, fasilitator literasi terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, serta komite sekolah. Pada ranah masyarakat, fasilitator literasi terdiri atas pegiat literasi dan pengelola perpustakaan publik atau taman baca. Peran fasilitator literasi sangat strategis dalam meningkatkan budaya literasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fasilitator menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan.

2) Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu

Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu menjadi syarat penting ketika GLN dilaksanakan. Hingga saat ini, sumber belajar bermutu yang berupa bahan bacaan masih kurang, baik dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan. Bahan bacaan yang tersedia tidak banyak pilihan, monoton pada tema-tema tertentu saja, dan tidak sesuai pula dengan jenjang kebutuhan pembaca. Sumber belajar yang berkualitas dan memadai masih dipandang kurang mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital merupakan pilihan yang tepat. Sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi.

3) Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar

Selain ketersediaan sumber belajar, keberhasilan kegiatan literasi pun perlu didukung dengan adanya kemudahan untuk mengakses sumber belajar tersebut. Agar masyarakat dapat menjangkau sumber-sumber belajar dengan mudah, perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung, seperti layanan taman bacaan dan pojok baca di tempat umum. Kemudahan akses terhadap sumber belajar berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta belajar. Semakin banyak sumber pembelajaran literasi yang mudah diakses oleh masyarakat, semakin meningkat pula ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan literasi.

4) Peningkatan Pelibatan Publik

Kesuksesan gerakan literasi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Pelaksanaan gerakan literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada lingkup eksternal Kemendikbud, pihak-pihak yang dapat terlibat adalah perguruan tinggi, Perpustakaan Nasional, Ikapi, lembaga donor, dan lain-lain. Gerakan Literasi Nasional juga memerlukan keterlibatan unsur masyarakat, seperti lembaga masyarakat di bidang pendidikan, perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat.

Selain itu, dunia industri pun dapat dilibatkan dalam gerakan ini melalui pengimplementasian tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Kesuksesan Gerakan Literasi Nasional dapat dicapai apabila tiap-tiap pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya masing-masing.

5) Penguatan Tata Kelola

Mekanisme pengelolaan ekosistem pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi salah satu strategi penopang kesuksesan GLN. Penguatan tata kelola yang dilakukan oleh pelaku literasi di berbagai ranah merupakan bentuk komitmen dan keseriusan semua pihak untuk mewujudkan kesuksesan gerakan ini. Penguatan tata kelola GLN dimaksudkan agar sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaksana di tingkat lapangan tetap terjamin. Untuk itu diperlukan kejelasan tugas dan fungsi masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian memiliki andil yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian ialah jalan atau langkah yang dipakai oleh peneliti dalam memperoleh atau mengumpulkan data penelitian, sehingga

tujuan dan hasil dari suatu penelitian dapat tercapai seperti yang diharapkan.⁵⁸ Pada tesis ini metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian.⁵⁹ Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berupaya menggambarkan atau memotret suatu gejala atau tanda-tanda, peristiwa, dan kejadian yang menjadi pusat perhatian di lapangan secara langsung tanpa ada pemberian perlakuan istimewa terhadap peristiwa tersebut.⁶⁰ Peneliti berupaya menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang tidak tersusun yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian menatanya menjadi suatu representasi yang kompleks dan holistik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No. 35, Purbosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55812

3. Subjek dan Objek Penelitian

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

⁶⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau objek yang diamati dalam bingkai yang diikuti sebagai tujuannya.⁶¹ Moelong menggambarkan subjek penelitian ialah informan, dalam arti seseorang yang digali untuk dimintai informasi mengenai ha-hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi tempat penelitian.⁶² Sedangkan objek penelitian ialah permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono, suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan dengan perubahan tertentu diidentifikasi oleh peneliti dan kemudian disimpulkan.⁶³

Pada penelitian ini yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah ialah individu yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan yakni meliputi pustakawan DPK Kabupaten Gunungkidul, pengelola Perpustakaan Desa, Kepala Desa, dan masyarakat desa yang menjadi objek penelitian. Sedangkan objek penelitian ialah *collaborative governance* dalam peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan. Masyarakat pada penelitian ini yaitu masyarakat secara umum yang meliputi anak-anak, remaja, dan orang tua di Kabupaten Gunungkidul.

4. Teknik Pengumpulan Sampel

Penelitian pada tesis ini menggunakan *purposive sampling* dalam pengumpulan sampel, yakni sebuah teknik pengambilan sampel data melalui alasan-alasan tertentu, misalnya pemelihan sampel dilakauakn sebaba orang

⁶¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2002), 13791.

⁶² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Elfabeta, 2010), 38.

tersebut dianggap paling mengetahui mengenai topik penelitian yang diteliti.⁶⁴ Pada saat peneliti terjun ke lapangan, peneliti akan menggunakan informan kunci (*key informan*) yaitu orang yang memiliki dan mengetahui seluruh informasi primer yang diperlukan untuk penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membagi Kepala Desa dan pengurus perpustakaan desa pada desa yang diteliti sebagai informan kunci yang diharapkan untuk dapat membagikan informasi-informasi yang diketahui untuk kebutuhan peneliti.

Informan selanjutnya ialah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul yang mana dalam hal ini diwakili oleh penanggung jawab program program perpuseru atau penanggung jawab dala program kerjasama yang dilakuakn oleh DPK Kabupaten Gunungkidul. Dari informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait *collaborative governance* dalam peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, sebuah penelitian dapat dikatakan berkualitas tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Senada dengan hal tersebut Sugiyono mengemukakan bahwa, langkah paling strategis dalam sebuah penelitian terletak pada teknik pengumpulan data, sebab tujuan dari peneitian yang paling utama adalah pengumpulan data.⁶⁵ Dalam

⁶⁴ *Ibid.*, 86.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 224.

pengumpulan data di lapangan pada penelitian kualitatif lazimnya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶⁶ Pada penelitian tesis ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan diikuti dengan mencatat keadaan dan perilaku yang dialami oleh objek penelitian.⁶⁷ Sedangkan menurut Sudjana, teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti yang dilakukan secara sistematis.⁶⁸ Di mana kegiatan pengamatan dan pencatatan tersebut dilakukan atau dilaksanakan pada tempat terjadinya peristiwa, sehingga observasi dapat dilakukan bersama dengan objek yang diselidiki. Observasi atau pengamatan tidak hanya terhadap manusia, melainkan dapat dilakukan juga terhadap objek-objek makhluk hidup lainnya.⁶⁹ Secara lebih luas, teknik observasi tidak hanya sebatas pada pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁰

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁶⁸ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

⁶⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 76.

⁷⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), 137.

Penelitian pada tesis ini, teknik observasi yang digunakan dalam memperoleh data yaitu melalui observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan adalah observasi yang peneliti tidak terlibat langsung pada kehidupan informan dan hanya sebagai pengamat indenpenden. Metode yang digunakan dalam melakukan observasi adalah:

- 1) Sasaran observasi, yaitu proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat pedesaan
- 2) Mencatat hasil observasi, melalui pengamatan, maka akan diperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat pedesaan, kemudian mencatat dalam bentuk catata yang jelas.
- 3) Peranan pengamatan, peranan pengamatan digunakan untuk memperkuat hasil dari wawancara maupun dokumentasi. Data yang telah didapatkan akan dicocokkan apakah telah sesuai.
- 4) Data yang diamati, pengamatan terhadap data dilakukan terhadap semua data yang berhubungan dengan proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat pedesaan.

b. Wawancara

Teknik wawancara ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber, yang memiliki arti pertanyaan berasal dari peneliti dan

jawabnya diberikan oleh informan dalam penelitian.⁷¹ Menurut Gulo, wawancara yaitu sebuah komunikasi yang terjadi antara peneliti dan informan atau narasumber.⁷² Di mana bentuk komunikasi yang dijalankan yakni tanya jawab secara langsung, sehingga tindakan dan ekspresi informan sebagai salah satu media yang melengkapi bahasa lisan. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur atau wawancara terfokus, dalam hal ini peneliti telah menyediakan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan secara langsung kepada informan secara tatap muka.⁷³ Pada proses wawancara peneliti mewawancarai Kepala Bidang Perpustakaan, Kepala Seksi Pengadaan, Pengolaan, dan Pelestarian Bidang Perpustakaan (P3BP), dan Pustakawan sebagai informan yang dijadikan sebagai sumber data. Dengan ketentuan pustakawan yang terlibat dalam proses *collaborative governance* peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan. Peneliti akan mengajukan kepada setiap informan pertanyaan yang sama, serta selama proses wawancara berlangsung, peneliti mencatat dalam bentuk catatan deskriptif. Selain itu pada penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu *smartphone* sebagai alat perekam.

⁷¹ Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik*, 105.

⁷² W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 116.

⁷³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 121.

Tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi lebih lengkap dan informasi tidak terlewatkan sekecil-kecilnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mendapatkan data dari dokumen atau berkas yang disimpan oleh objek penelitian, di mana berisikan informasi mengenai penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan transkrip, surat kabar, buku, prasasti, notulen, agenda, dan lain sebagainya.⁷⁴ Kajian dokumen dalam penelitian ini berupa laporan capaian perpustakaan, naskah perjanjian, laporan sirkulasi perpustakaan baik jumlah pengunjung, peminjaman, dan jumlag keanggotaan perpustakaan dari tahun 2012-2021. Adapun cara peneliti dalam memperoleh data data tersebut yaitu dengan cara cara memfotokopi, memotret, menyalin, merekam, ataupun langsung mencetak di tempat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan sebuah kegiatan mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan bahan lainnya secara sistematis yang bertujuan untuk mudah dipahami maupun pada saat diinformasikan dapat dimengerti orang lain.⁷⁵ Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh selanjutnya dari proses wawancara, pengamatan atau observasi

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 274.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 197.

serta dokumentasi selanjutnya akan dianalisis. Miles dan Huberman dalam Sugiyono dalam hal ini telah membagi analisis data metode penelitian kualitatif menjadi tiga alur kegiatan, yaitu:⁷⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu kegiatan pemilahan, peringkasan, penyederhanaan data kasar yang diperoleh saat di lapangan menjadi data yang lebih sederhana.⁷⁷ Dalam hal ini, adapun langkah-langkah untuk mereduksi data tersebut ialah dengan menganalisis lebih tajam, mengelompokkan atau menyesuaikan data kepada tiap permasalahan dengan ringkasan singkat, mengeliminasi data yang tidak dipakai, dan menyusun data agar mudah ditarik kesimpulan maupun diperiksa ulang. Data-data yang akan direduksi merupakan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah melakukan reduksi data, peneliti akan mengecek ulang jawaban informan hasil wawancara dengan pengamatan dan data dokumenter hingga ditemukan jawaban yang sesungguhnya. Dalam menekan jawaban tersebut, diperlukan untuk mengulangi lagi dengan wawancara, observasi, dokumen lain, bahkan untuk mendapatkan hasil lebih akurat diperlukan untuk melakukan cek informasi dari informan pertama, kedua, hingga seterusnya. Pada penelitian tesis ini,

⁷⁶ *Ibid.*, 247.

⁷⁷ M. B Miles, M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 16

kegiatan analisis data terus dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemeriksaan ulang, analisis dan analisis ulang hingga ditemukan fakta yang sebenarnya.

b. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah data di reduksi adalah kegiatan penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah disusun, dengan data tersebut peneliti dengan mudah untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.⁷⁸ Penelitian pada tesis ini penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan setiap katagori, dan *flowchard*. Selain itu bentuk data yang akan disajikan pada penelitian yakni dengan menggunakan teks naratif. Melalui hal tersebut, penyajian data diharapkan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan selanjutnya membuat rencana kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan simpulan dan verifikasi

Verifikasi merupakan sebuah proses pengambilan kesimpulan berdasarkan dari data hasil penelitian. Verikasi atau menarik kesimpulan merupakan suatu proses memahami atau mencari makna, urutan, model, pola, alur penjabaran, sebab-akibat, dan sejenisnya. Dalam hal ini data yang ditarik untuk menjadi sebuah kesimpulan merupakan hasil dari proses reduksi data, representasi, dan kesimpulan dari hasil verifikasi

⁷⁸ *Ibid.*, 17.

kegiatan sebelumnya. Menurut Miles dan Huberman, suatu kegiatan analisis tidak hanya satu kali, tetapi interaktif, selama periode penelitian dilakukan secara bergantian antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁹ Setelah proses verifikasi, kegiatan selanjutnya ialah menarik kesimpulan yang diambil dari hasil pernyataan naratif. Setelah menarik kesimpulan, maka kegiatan dari analisis data dan pengolahan data telah selesai atau berakhir.

G. Uji Keabsahan Data

Pada suatu penelitian uji keabsahan data biasanya hanya difokuskan pada uji reliabilitas dan validitas.⁸⁰ Sementara pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, uji keabsahan data wajib memenuhi empat kriteria, yaitu uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability, dan uji corfirmability.⁸¹ Pada pada penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (*credibility*), yaitu sebuah uji kepercayaan pada hasil penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, kredibilitas data penelitian kualitatif dapat diuji dengan cara memperluas observasi, menambahkan peraturan penelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁸² Untuk menguji kredibilitas penelitian tesis ini, peneliti menggunakan triangulasi.

⁷⁹ *Ibid.*, 18

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 181

⁸¹ *Ibid.*, 185

⁸² *Ibid.*

Tringulasi merupakan sebuah metode pengecekan kembali keabsahan data dengan cara memanfaatkan faktor dari luar data yang diuji, atau sering disebut dengan membandingkan data yang telah diperoleh.⁸³ Tringulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu tringulasi sumber, teknik, dan waktu. Tringulasi sumber melalui metode mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sementara tringulasi teknik melalui metode mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, sedangkan tringulasi waktu adalah metode dengan cara melakukan pengecekan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda atau dalam kurung waktu tertentu.⁸⁴

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, dan tringulasi teknik.

- a. Tringulasi sumber, yakni data yang telah diperoleh melalui wawancara kepada informan atau sumber. Dengan pertanyaan yang sama dilakukan wawancara dengan sumber/informan yang lain. Misalkan infroman A mengatakan informasi mengenai proses *collaborative governance*, kemudain dilakukan pengecekan terhadap teman sejawat dan mengatakan proses *collaborative governance* sama dengan jawaban infroman A. Kemudian jawaban dari informan B akan dicek lagi dengan atasan infroman A. Jika semua data telah

⁸³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-331.

⁸⁴ Anis Fuad, Kandang Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 66

dicek dan hasil atau jawaban sama mengenai proses *collaborative governance*, maka data tersebut valid.

- b. Triangulasi teknik, yakni peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi) untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Misalkan, informan A mengatakan strategi peningkatan literasi masyarakat, kemudian dilakukan pengecekan terhadap informan B (atasan informan A) juga mengatakan strategi peningkatan literasi masyarakat dengan jawaban yang sama. Kemudian akan dilakukan cek terhadap data, yakni melalui dokumen-dokumen yang tersedia. Jika semua data telah di cek dan hasilnya sama mengenai strategi peningkatan literasi masyarakat, maka data tersebut valid.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian pada tesis ini terdiri atas beberapa bab bahasan. Berikut penjelasan dari bagian-bagian bab tersebut:

BAB I merupakan pendahuluan dari rangkaian tesis ini. Pada Bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini akan digunakan penulis untuk pijakan pemaparan analisis terhadap bab pembahasan, dan berguna untuk penarikan kesimpulan pada bab penutup.

BAB II merupakan gambaran umum dari lokasi penelitian. Bab ini berisikan tentang gambaran-gambaran umum yang diteliti seperti sejarah singkat lokasi perpustakaan, visi misi, layanan, struktur organisasi, dan lainnya.

BAB III merupakan pembahasan inti dari tesis ini, yakni berisikan jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan ada bab I atau bab pendahuluan.

BAB IV merupakan bagian akhir dari rangkaian tesis ini. Bab ini berisikan kesimpulan dari ringkasan hasil penelitian. Di mana pada bab keempat ini peneliti akan memuat kesimpulan, saran, dan diakhiri dengan rekomendasi penelitian untuk selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi terlaksananya *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPK Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan tidak hanya berfokus peningkatan literasi semata, tetapi terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat pada proses kolaborasi tersebut. Dalam hal ini DPK Kabupaten Gunungkidul mengalami keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ini untuk mengatasi kendala tersebut, DPK Kabupaten Gunungkidul melaksanakan *collaborative governance* baik dengan pihak pemerintah yakni OPD di Kabupaten Gunungkidul maupun pihak swasta. *Kedua*, kurangnya anggaran yang dimiliki oleh DPK Kabupaten Gunungkidul. Faktor lain yang melatarbelakangi terlaksananya *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul ialah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DPK Kabupaten Gunungkidul. Proses *collaborative governance* memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya, sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain. Hal inilah faktor kedua yang melatarbelakangi terlaksananya *collaborative governance*

dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam pelaksanaannya stakeholders dari pihak swasta memberikan dukungan berupa pendanaan dengan pemberian dana *corporate social and responsibility* (SCR), yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan selama proses kolaborasi. *Ketiga*, regulasi kebijakan. Pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul menemukan hambatan dalam pelaksanaannya yakni terkendala dengan regulasi. Kendala yang menjadi hambatan dalam proses *collaborative governance* yakni mengenai regulasi dari upah atau bayaran yang diterima oleh pengelola atau pustakawan di Perpustakaan Desa. Bayaran yang diterima oleh pustakawan tentunya menentukan kinerja dari pustakawan tersebut, untuk itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul melakukan advokasi dengan stakeholders dalam rangka menentukan regulasi yang tepat mengenai upah yang diterima oleh pengelola atau pustakawan Perpustakaan Desa. Dengan adanya upah yang sesuai dengan harapan dapat mendukung proses peningkatan literasi masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Strategi peningkatan literasi informasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yang dijalankan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul yaitu memperbanyak koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat sudut baca, mengadakan layanan perpustakaan keliling, menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat, mengadakan perlombaan yang berkaitan dengan perpustakaan, menjalin kerjasama dengan berbagai

pihak, melakukan pembentukan, pembinaan, dan pendampingan perpustakaan desa.

3. Model *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat kawasan di DPK Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi lima tahap, adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Kondisi awal (*starting conditions*)

Kondisi awal peningkatan literasi masyarakat pedesaan dilakukan secara mandiri tanpa adanya kerjasama oleh setiap stakeholders. Dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran serta regulasi menyebabkan terlaksananya *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu melihat sejarah masa lalu belum terjadinya kolaborasi dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul.

- b. Desain Institusional

Desain institusional *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai landasan dalam bekerjasama ialah Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Selain menggunakan Undang-Undang, *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan menggunakan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU).

- c. Kepemimpinan Fasilitatif

Proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul memiliki sosok kepemimpinan fasilitatif. Dalam hal ini, kepemimpinan fasilitatif di perankan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul. pada pelaksanaannya, DPK Kabupaten tidak hanya berperan sebagai aktor yang mengaggas terjalannya kerjasama, DPK Kabupaten Gunungkidul juga menjadi fasilitator di dalam penyelesaian masalah di lapangan antara *stakeholders*.

d. Proses Kolaborasi

Proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari beberapa tahap. *Pertama*, tahap dialog tatap muka. Dialog tatap muka diinisiasi oleh DPK Kabupaten Gunungkidul melalui sebuah pertemuan yang diberi nama *stakeholders meeting*. Pertemuan pada *stakeholders meeting* merupakan sebuah pertemuan dengan *stakeholders* baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Melalui *stakeholders meeting*, setiap aktor baik dari Perpustakaan Desa yang berada di Kabupaten Gunungkidul maupun swasta memberikan pandangannya mengenai program peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan. Selain itu pada pertemuan *stakeholders meeting*, setiap aktor memberikan informasi mengenai kelebihan, kekurangan, dan kendala yang dimiliki oleh setiap aktor. *Kedua*, membangun kepercayaan. Upaya untuk membangun kepercayaan pada program peningkatan literasi masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunungkidul ialah melalui penandatanganan MoU dan

komunikasi intens yang terjalin antara para aktor atau *stakeholders* yang terlibat. *Ketiga*, komitmen terhadap proses (*commitment to process*). Pada *collaborative governance* peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, komitmen dari masing-masing aktor sangat tinggi dan berbeda-beda. Dalam hal ini pihak DPK Kabupaten Gunungkidul memberikan bimbingan dan arahan kepada perpustakaan desa dalam menjalankan arah program peningkatan literasi masyarakat, serta berperan sebagai pengawas dalam implementasi program tersebut. Dari Pemerintah Desa komitmen yang diberikan ialah dengan melakukan advokasi kepada masyarakat agar program peningkatan literasi mendapat dukungan dari masyarakat dan menganggarkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk Perpustakaan Desa. Sedangkan komitmen yang dari pihak swasta yakni dengan dukungan material dari dana CRS yang dimiliki dan bimbingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Keempat*, kesepahaman bersama (*share understanding*). Pada peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul kesepahaman bersama telah berjalan dengan baik. Dalam hal ini semua *stakeholders* yang terlibat telah menyamakan visi misi, tujuan, dan rencana strategis secara bersama-sama. Selain itu, permasalahan yang timbul saat implementasi program, maka semua aktor aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut dan keputusan diambil secara bersama-sama.

4. Terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam peningkatan kemampuan literasi informasi masyarakat

kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul. Adapun faktor yang mendukung yaitu komitmen dari *stakeholders*, *information sharing*, dan bantuan dana pihak swasta. Sedangkan faktor yang menghambat proses *collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yaitu dukungan pemerintah desa, dan komitmen pengelola Perpustakaan Desa.

B. Saran

1. *Collaborative governance* dalam peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul memang telah berjalan dengan baik dan bahkan paradigma masyarakat mengenai perpustakaan telah berubah, perpustakaan tidak hanya dianggap sebagai tempat menyimpan buku, tetapi sebagai pusat pengetahuan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan desa mengalami peningkatan dari pada sebelum terjadinya kolaborasi. Namun, menurut penilaian peneliti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peningkatan literasi masyarakat didominasi oleh wanita dan anak-anak, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar perpustakaan meningkatkan keterlibatan kaum laki-laki, baik melalui sosialisasi atau promosi maupun melalui kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan khusus untuk kaum laki-laki.
2. Hendaknya DPK Kabupaten Gunungkidul meningkatkan hubungan baik terhadap *stakeholders* dengan terus membangun komunikasi intensif kepada setiap aktor yang telah terlibat dalam *collaborative governance* peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten

Gunungkidul. Namun, hendaknya DPK Kabupaten Gunungkidul melakukan penjangkauan untuk kolaborasi dengan pihak organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan di yang berada di desa, seperti karang taruna, taman bacaan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan sekolah-sekolah yang berada di sekitar desa seperti PAUD, SD, SMP, dan SMA. Keterlibatan lapisan masyarakat yang lebih luas pada *collaborative governance*, diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat secara menyeluruh.

3. Dalam *collaborative governance* peranan pemerintah desa memegang peranan penting dalam pelaksanaannya. Peran pemerintah desa dalam kolaborasi terlihat jelas sebagai pemberian bantuan operasional dan pembiayaan gaji pengelola perpustakaan. Seperti diketahui, *collaborative governance* peningkatan literasi masyarakat kawasan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul berbasis pada perpustakaan desa tentunya membutuhkan pendanaan baik untuk operasional maupun untuk gaji pengelola perpustakaan. Selama ini pemerintah desa telah menganggarkan APBDesa untuk operasional perpustakaan desa, namun jumlah yang dianggarkan masih dalam katagori sedikit dan belum dapat menutupi dana operasional dan gaji pengelola perpustakaan. Untuk itu DPK Kabupaten Gunungkidul harus dapat mengadvokasi pemerintahan desa agar dapat menambah anggaran APBDesa untuk perpustakaan desa dan gaji pengelola perpustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legeslatif

di Kabupaten Gunungkidul untuk mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai penganggaran APBDesa untuk perpustakaan desa.

4. Hendaknya pemerintah desa melibatkan perpustakaan desa di setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pelibatan perpustakaan desa dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan sebagai salah satu cara untuk menjaga eksistensi perpustakaan desa di tengah masyarakat. Selain itu, hendaknya pemerintah desa menjadikan perpustakaan sebagai wahana atau destinasi bagi masyarakat, seperti menyediakan fasilitas bermain bagi anak-anak, sarana olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu diperlukan peran DPK Kabupaten Gunungkidul agar dapat mengadvokasi pemerintahan desa agar merealisasikan program tersebut. Dengan tersedianya fasilitas pendukung lainnya di perpustakaan desa, diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Clay, M. M. *Change over Time in Children's Literacy Development*. Portsmouth: -, 2001.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press, 2015.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fendt, Thomas Christian. *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Berlin: Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin, 2010.
- Gong, Gol A., Agus M. Irkham. *Gempa Literasi*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hartomo, Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kalida, Muhsin. *Penguatan Lembaga Perpustakaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Penuntasan Buta Aksara Di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Paud dan Dikmas, 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kemendikbud, 2017.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk., *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2013.

- Kern, Richard. *Literacy & Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Miles, M. B, and M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Romdhoni, Ali. *Al-Qur'an Dan Literasi*. Gombong: Linus, 2013.
- Rosidi, dkk, Abiradin. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Sudarmo. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media: 2010.
- Suharyanto. *Administrasi Publik: Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reiventing Gouvernance*. Yogyakarta: Media Wacana, 2005.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Elfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- , *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Subarsono, Agustinus. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Medina, 2016.
- Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.

Artikel/Karya Ilmiah/Laporan:

- Ansell, C., A. Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice.” *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18, No. 4. November 2007.

- Arbarini, Mintarsih, Achmad Rifai, and Sungkowo Edy Mulyono. "Model Literasi Berbasis Entrepreneurship Dalam Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan Istri Nelayan Tradisional." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. Vol. 2, No. 2. December 2018.
- Chang, Hyun Joo. "Collaborative Governance in Welfare Service Delivery: Focusing on Local Welfare System in Korea." *International Review of Public Administration*. Vol. 13, No. 1. Maret 2009.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance", *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 22, No 1. Januari 2012.
- Febrian, Ranggi Ade. "Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. 2, No. 2, Oktober 2016.
- Harahap, Fitri Ramdhani. "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia." *Society*. Vol. 1, No. 1. Juni 2013.
- Ikawati, Ikawati, Sri Wahyuni. "Kondisi Kemiskinan Di Perdesaan dan Perkotaan." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 2. Juli 2020.
- Junaidi. "Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang." *Naskah Publikasi Fisip Umrah*. 2015.
- Khadafi, Rizal, Dyah Mutiarin. "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul." *Journal of Governance and Public Policy*. Vol. 4, No. 2. Juli 2017.
- Muslim, Budiman. "Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat." *Jurnal Imam Bonjol Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Vol. 2, No 2 (2018).
- Newman, Janet, Barnes, Marian; Sullivan, Helen and Knops, Andrew. "Public participation and collaborative governance". *Journal of Social Policy*. Vol. 33, No. 2, (2004).
- Prasetyawan, Yanuar Yoga, Ika Krismayani, Mecca Arfa, Arina Faila Saufa. "Peran Perpustakaan Umum Kabupaten Gunung Kidul dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Pustaka Budaya*. Vol. 5, No. 1. Februari 2018.

Saepudin, Encang. “Partisipasi Masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bandung.” *Sosiohumaniora*. Vol. 20, No. 1. Maret 2018.

Yulyanah, Siti, Riska Sarofah. “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod.” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*. Vol. 3, No. 1. Desember 2019.

Zuhdiyaty, Noor, David Kaluge. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir.” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*. Vol. 11, No. 2. Februari 2017.

Website:

Badan Pusat Statistik. “Kemiskinan dan Ketimpangan.”

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

Diakses pada tanggal 11 November 2020.

Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2018-

2020.” <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.

Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

BPS Kab.Gunungkidul. “Jumlah Penduduk Miskin.”

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/79/1/jumlah-penduduk-miskin-ribuan-.html>.

Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

BPS Kab.Gunungkidul. “Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul.”

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/31/1/persentase-penduduk-miskin-kab-gunungkidul.html>.

Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. “Jumlah Penduduk Miskin.”

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>.

Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. “Persentase Penduduk Miskin”

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/1/persentase-penduduk-miskin.html>.

Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Jumlah Penduduk Buta Aksara Turun Menjadi 3,29 Juta.”

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/jumlah-penduduk-buta-aksara-turun-menjadi-329-juta>.

Diakses pada tanggal 11 November 2020.

Haryanti, Woro Titi. “Memperkuat Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
[https://mediaindonesia.com/humaniora/236045/memperkuat-literasi-
untuk-kesejahteraan-masyarakat](https://mediaindonesia.com/humaniora/236045/memperkuat-literasi-untuk-kesejahteraan-masyarakat). Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

